

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF ISLAM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH

Muh. Hasyim Rosyidi

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: hasyimrosyidi@insud.ac.id

Dikirim: 20 Oktober 2018 | Direvisi: 2 Januari 2019 | Dipublikasikan: 31 Januari 2019

Abstraksi: Analisis kebijakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi yang rasional dengan menggunakan data yang ada untuk menilai, menjelaskan dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah. Dalam dunia pendidikan, kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kelancaran proses belajar mengajar di suatu sekolah. Disisi lain ia sebagai manajer yang mengatur seluruh kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Kepala sekolah merupakan jabatan yang istimewa karena sebagai penanggung jawab utama mengelola sebuah lembaga yang istimewa yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal pendidikan yang akan sangat mewarnai masa depan anggotanya. Dan kepala sekolah tidak dapat lepas dari kekuasaan, karena tanpa kekuasaan pemimpin tidak memiliki kekuatan yuridis atau kekuasaan lain dalam mempengaruhi orang lain agar bertindak seperti yang ia kehendaki. Oleh karena itu kepala sekolah harus memahami tentang apa itu kebijakan dan tuntunannya dalam syariat, sehingga kedepannya kepala sekolah dapat melaksanakan amanah yang diberikan demi kemajuan lembaga yang dipimpinnya.

Kata kunci: *Analisis kebijakan; profesionalisme; kepala sekolah.*

Pendahuluan

Pendidikan Islam pada intinya merupakan sistem meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks sosio-historis manusia tidak bisa lepas dari proses pendidikan, dimana proses pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Dalam merespon perkembangan zaman, pendidikan Islam dihadapkan tantangan era globalisasi yang memberikan kesan sangat *marketable*, lulusan pendidikan yang Pendidikan Nasional sedang mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang SISDIKNAS), manajemen, dan kurikulum, yang diikuti oleh perubahan-perubahan teknis lainnya. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan pendidikan, baik masalah-masalah konvensional maupun masalah-masalah yang muncul bersamaan dengan hadirnya ide-ide baru (masalah inovatif).

Untuk menunjang keberhasilan dalam perubahan-perubahan yang dilakukan dan diharapkan, perlu disiapkan kepala sekolah profesional, yang mau dan mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan perubahan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah menjadi pimpinan satuan pendidikan yang dimiliki fungsi manajerial, administrator, educator, supervisor, leader, motivator, wirausahawan harus mampu menjabarkan fungsi dalam tugas dan tanggung jawab.¹ Seperti di dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

¹ Mulyono, *Educational Leadership* (Malang: UIN Malang Press, 2009), iii

Artinya: “Masing-masing kamu adalah pengembala (pemimpin) dan masing-masing kamu harus bertanggung jawab atas kepemimpinanmu” (H.R Bukhari)²

Dalam hadits tersebut memberikan interpretasi tentang kepemimpinan, bahwa manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dalam pendidikan sekarang ini banyak kepala sekolah menunjukkan bahwa perhatian terhadap kepala sekolah relatif kurang di banding terhadap guru, padahal kepala sekolah merupakan penanggung jawab tunggal di sekolah. Kalau di dalam Angkatan Bersenjata ada istilah ”tidak ada prajurit yang bersalah” maka dalam pendidikan pun “ tidak ada tenaga kependidikan “ yang bersalah, yang selama ini justru sering kali di salahkan adalah guru, padahal sebagian besar kesalahan dan dosa guru adalah kesalahan dan dosa kepala sekolah.

Tidak mudah untuk menjadi kepala sekolah profesional, banyak hal yang harus difahami, banyak masalah yang harus di pecahkan, dan banyak strategi yang harus di kuasai. Kurang adil jika pengangkatan kepala sekolah hanya di dasarkan pada pengalaman menjadi guru yang di ukur dari segi waktu (lamanya menjadi guru). Untuk menjadi kepala sekolah professional perlu di mulai dari pengangkatan yang profesioanal pula, demikian halnya masa menjadi kepala sekolah, bukan jamannya lagi menjadi kepala sekolah seumur hidup. Kepala sekolah perlu di pilih dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun), dan setelah itu di lakukan pemilihan yang baru, kepala sekolah lama kembali menjadi guru.

Oleh karena itu diperlukan pengkajian kebijakan yang tepat sasaran untuk pencapaian tujuan kebijakan pendidikan nasional. Berkaitan dengan itu, semua komponen alternatif atau strategi, kemampuan mengkaji, komitmen dan budaya saling menghargai gagasan atau argumen-argumen yang relevan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi pembangunan pendidikan dan diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan pendidikan.³

Landasan Teori Tentang Kebijakan

Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan kepandaian, kemahiran, kebijakan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dipelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.⁴

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode.

Model Perumusan kebijakan

Model adalah representasi dari sebuah aspek dalam dunia nyata yang disederhanakan. Kadang-kadang model berupa objek, sebuah situasi atau proses. Namun, yang jelas model representasi yang nyata. Dengan adanya model dapat mengurangi informasi yang banyak menjadi

² Ma'mur Daud, *Terjemah Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Widjaya, 1993), 14

³ Nanang Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), iii.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Kamus Digital). kata 'kebijakan'.

bentuk dan ukuran yang lebih dapat dikelola. Macam-macam model dalam perumusan kebijakan : Model Elite, Model Kelompok, Model Institusional, Model Inkremental, Model Rasional.

Analisis Kebijakan

Untuk memahami arti analisis kebijakan yang berlaku umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, maka perlu disajikan beberapa pengertian analisis kebijakan berbagai bebrapa ahli sebagai berikut:

1. Patton dan sawicki mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan.
2. Menurut Ace Suryadi mrngartikan analisis kebijakan sebagai cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan memecahkan masalah kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu yang berupa memecahkan masalah dengan menggunakan teori, metode dan subtansi penemuan tingkah laku dan ilmu-ilmu sosial, profesi sosial, dan filosofi politis. Sebagaimana aktivitas menggambarkan analisi kebijakan, salah satunya diadopsi bahwa analisis kebijakan adalah proses pengkajian multidisipliner yang dirancang secara kreatif, dengan penilaian yang kritis, dan mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat dan dipahami serta meningkatkan kebijakan.⁵

Prosedur Analisis Kebijakan

Metodologi kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia definisi, prediksi, preskripsi dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Evaluasi yang mempunyai nama sama yang dipakai dalam bahasa sehari-hari menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah.

Analisis kebijakan menurut patton sawinski pertama kali digunakan oleh E.Linblom pada tahun 1958, dia merujuk istilah itu untuk jenis analisis kuantitatif yang melibatkan perbandingan inkremental di mana metode nonkuantitatif termasuk pengakuan interaksi nilai dan kebijakan.

Prosedur atau langkah-langkah tahapan dari proses analisis kebijakan menurut Patton dan sawinski adalah :

1. Verifikasi, Definisi dan Pencarian Masalah
Menyusun atau merumuskan masalah kebijakan merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang analis. Selama proses analisis, seorang analis harus mampu mendefinisi ulang masalah agar masalah itu dapat dipecahkan.
2. Menentukan Kriteria Evaluasi.
Supaya alternatif-alternatif kebijakan dapat diperbandingkan, diukur, dan dipilih maka kriteria evaluasi yang relevan harus disusun. Beberapa ukuran yang umum digunakan mencakup: biaya, keuntungan bersih, keefektivan, keefisiensian, administrasi yang mudah, legalitas dan

⁵ Fattah. *Analisis Kebijakan...*, 5.

dapat diterima secara politis. Dimensi politis dari masalah yang akan mempengaruhi suatu pemecahannya harus diidentifikasi, karena berbagai alternatif akan berbeda-beda dalam aseptabilitas politiknya. Kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alterantif kebijakan misalnya dengan melihat sisi efisiensi, efektivitas, cakupan dan keberlanjutannya.

3. Identiikasi Alternatif Kebijakan

Pada proses ini analis harus memiliki suatu pemahaman tentang nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan sasaran-sasaran tidak hanya dari pemberi pemerintah untuk menganalisis tetapi juga meliputi kelompok orang-orang lainnya. Kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dapat dipergunakan untuk menilai alternatifalternatif, menolong analis menghasilkan alternatif kebijakan. Analis akan lebih baik memiliki daftar alternatif-alternatif yang memungkinkan. Alternatif dapat diidentifikasi melalui banyak cara misalnya dengan penelitian dan eksperimeneksperimen, melakukan test atas ide-ide dengan meminta pemikiran orang lain melalui survey.

4. Evaluasi Alternatif Kebijakan

Sifat masalah dan tipe kriteria evaluasi akan memberi gambaran metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif. Beberapa masalah membutuhkan analisis kuantitatif, dan lainnya membutuhkan analisis kualitatif, bahkan banyak yang memutuhkan keduanya. Informasi dapat diketemukan selama identifikasi dan evaluasi kebijakan yang mungkin menampakan aspek-aspek baru dari masalah yang memerlukan tambahan atau perbedaan kriteria evaluasi.

5. Memunculkan dan Memilih di antara Alternatif-Alternatif Kebijakan

Hasil evaluasi dapat ditampilkan sebagai suatu daftar alternatif-alternatif, penjumlahan/penghi-tungan kriteria, dan laporan tingkat/derajat kriteria yang dipenuhi oleh masing-masing alterantif. Menggunakan matrik yang memperbandingkan alternatif-alternatif merupakan cara yang sangat baik, yang memudahkan orang lain membaca dan memahami

6. Memantau Dampak Kebijakan

Meskipun kebijakan telah diimplementasikan, masih ada keraguan apakah masalah telah dipecahkan dengan baik dan apakah kebijakan yang dipilih telah diimplementasikan dengan baik. Hal ini perlu dipahami karena program perlu dimonitoring selama inplementasi untuk menjamin bahwa kebijakan ini mengubah bentuk tanpa sengaja, dan juga untuk mengukur dampak kebijakan. Selain itu, juga untuk menentukan apakah mereka memiliki dampak yang diinginkan, dan untuk memutuskan apakah kebijakan atau program itu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan.⁶

7. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting.⁷ Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan di lapangan, apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. memberikan pengertian tentang evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.⁸ Dye dalam Parsons memberikan pengertian evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek daari kebijakan dan program publik terhadap targetnya

⁶ Ibid., 184

⁷ Tangkilisan, Nogi, Hessel, *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel* (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), 2.

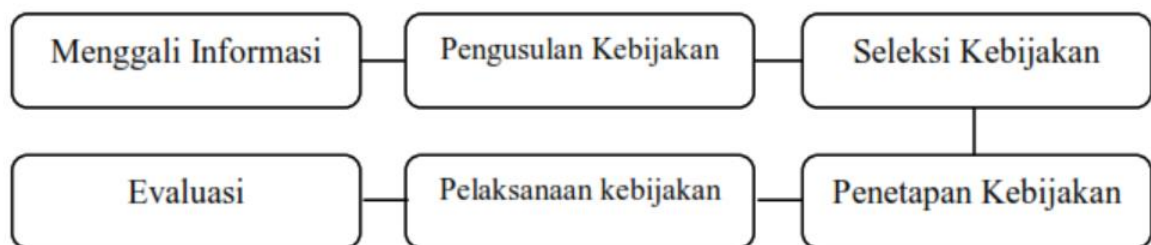
⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 119.

dari segi tujuan yang dicapai.⁹ Banyak problem yang dialami dalam aktivitas mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problem-problem tersebut adalah :

- Bila tujuan kebijakan tidak jelas. yang dipaksakan pada saat formulasi kebijakan kompromi dan karena banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya.
- Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
- Tak jelasnya masalah, sumber masalah dan gejala masalah. Ketidak jelasan demikian, bisa jadi karena antara masalah, sumber masalah dan gejala masalah sudah tumpang tindih.
- Subjektifitas dalam kebijakan.

Analisis Kebijakan Pespektif Islam Dalam Meningkatkan Profesionalisme kepala sekolah

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Pada saat ini dibutuhkan kecerdasan dalam berinovasi dalam mencari solusi permasalahan memulai menggali informasi, pengusulan kebijakan, seleksi kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi :



Gambar 1. Tahapan-Tahapan Analisis Kebijakan

Dari tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan oleh seorang pemimpin dimulai dari Penggalan informasi karena kurangnya kepala sekolah yang sedikit memahami tugasnya dengan baik, sehingga pada saat koordinasi yang di laksanakan pemimpin mengusulkan kebijakan-kebijakan demi kemajuan kepala sekolah yang ada, kemudian menyeleksi kebijakan yang efektif. Sebagai penetapan kebijakan, pemimpin meminta persetujuan kepala sekolah yang hadir dalam koordinasi, ketika sudah disepakati bersama selanjutnya kepala sekolah melaksanakan kebijakan. Dari kebijakan ini banyak kepala sekolah yang antusias dalam melaksakannya, hal tersebut dikarenakan kebijakan ini telah disepakati bersama-sama, juga selalu mengevaluasi sejauh mana hasil dari dari kebijakan yang telah dilaksanakan, jika kebijakan ini cocok untuk kepala sekolah maka kebijakan ini akan diteruskan.

Konsep kebijakan merupakan salah satu pesan syari'at yang sangat ditekankan di dalam al-Qur'an keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam suatu rumah kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam bentuk rumah besar yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat , konsep kebijakan merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan

⁹ Dye Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008), 559.

rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.

konsep kebijakan ini sudah di pernah diterapkan pada zaman Rasulullah SWT. Surat Ali-Imraan ayat 159 :

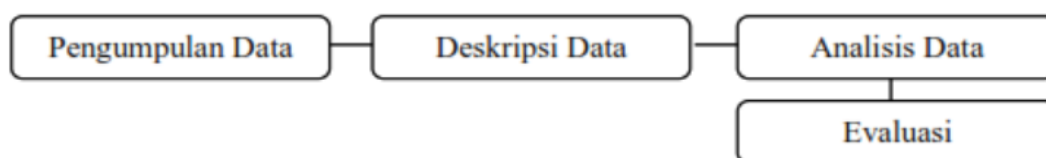
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁰

Ayat ini memiliki hubungan yang erat terhadap peristiwa Perang Uhud. Pada peristiwa tersebut kaum muslim mengalami kekalahan telak akibat hilangnya disiplin sebagian tentara Islam terhadap perintah yang telah ditetapkan nabi. bahkan dalam satu riwayat pada waktu itu Nabi terluka sangat parah dan giginya rontok. Ayat ini serta beberapa ayat berikutnya merupakan penjelasan tentang sikap dan sifat nabi sebagai leader yang mesti diambil ketika menghadapi fakta yang tidak sesuai dengan instruksinya sekaligus sebagai sugesti dari Allah agar selalu optimis dalam perjuangan.

Model Perumusan Kebijakan dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah.

Model adalah repretanse dari sebuah aspek dalam dunia nyata yang disederhanakan. Kadang-kadang model berupa objek, sebuah situasi atau proses. Dengan adanya model dapat mengurangi informasi yang banyak menjadi bentuk dan ukuran yang lebih dapat dikelola, model pada saat merumuskan kebijakan :



Gambar 2. Model Perumusan Kebijakan

Dalam pelaksanaan perumusan kebijakan yang dilakukan yaitu dimulai dari pengumpulan data yang dihadiri oleh semua kepala sekolah yang ada untuk membahas kebijakan yang akan ditetapkan, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni deskripsi data yaitu keinginan-keinginan kepala sekolah dilontarkan dan didiskusikan pada saat rapat, analisis data dengan masukan-masukan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT. PantjaSimpati, 1982), 159.

yang ada kemudian disaring masukan yang cocok untuk kepala sekolah dan evaluasi.

Sebelum kebijakan benar-benar diputuskan, seluruh komponen yang ada dari yang berkompeten menggali dan menyerap informasi yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan formulasi solusi yang tepat untuk mewujudkan tujuan-tujuan diatas. Sebagai alternative kebijakan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan.

Faktor utama keberhasilan dalam merumuskan kebijakan itu ditentukan atas teknik atau model dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh kepala dalam melakukan kebijakan terhadap bawahannya. Oleh karena itu seyogyanya dalam merumuskan kebijakan dilaksanakan tepat sesuai objeknya. Teknik yang digunakan dalam merumuskan kebijakan dalam meningkatkan profesionalisme kepala sekolah dengan menggunakan teknik kelompok atau musyawarah.

Model kelompok atau pembinaan terhadap sejumlah kepala sekolah mempunyai kualifikasi yang relatif sama mendapat bimbingan oleh kepala yang biasanya memiliki spesialis yang berbeda. Kepala dalam memberikan materi atau membahas sesuatu yang berbeda-beda, yang semuanya bertalian satu dengan yang lainnya, atau dapat juga suatu topik tertentu yang dibahas ditinjau dari berbagai sudut pandang. Sekelompok materi dihadirkan itu diterima bersama kepala sekolah, dibahas bersama dan disimpulkan bersama. Semua dilakukan berdasarkan asuhan dari kepala tersebut, agar semua kepala sekolah mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pembinaan dan arahan bersama-sama. Model pada saat rapat kepala sekolah untuk memudahkan kepala sekolah dalam menyampaikan pendapatnya agar bisa didengarkan semua anggota madrasah dan juga mendiskusikan pendapat-pendapat yang ada secara bersama-sama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Syura ayat 42 :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.

Ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Saw. Dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al Anshari. Namun demikian, ayat ini juga berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

Dari ketiga ayat di atas saja, maka sepintas dapat diduga bahwa Al-Quran tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan musyawarah. Namun dugaan tersebut akan sirna, jika menyadari cara Al-Quran memberi petunjuk serta menggali lebih jauh kandungan ayat-ayat tersebut.

Ayat ini merupakan ayat *leadership* dan musyawarah di tengah-tengah keadaan yang sangat darurat dalam peperangan, nabi tetap mengedepankan hasil keputusan musyawarah bersama para sahabat tentang bagaimana mensiasati taktik perang di gunung Uhud. Dari hasil musyawarah tersebut nabi mengikuti pendapat mayoritas sahabat, meskipun hasilnya sangat mengecewakan karena berakhir dengan kekalahan kaum muslim, saat itulah Rasulullah memutuskan untuk menghapuskan adanya konsep musyawarah. Namun dengan turunnya ayat ini, Allah berpesan

kepada nabi bahwa tradisi musyawarah tetap harus dipertahankan dan dilanjutkan meskipun terbukti terkadang hasil keputusan tersebut keliru.

Penjelasan Surat di atas yg Pertama ialah Para ulama berkata: “Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya dengan perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya Allah memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan perintah beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara.

Kedua, Ibnu ‘Athiyah berkata, “Musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan firmanNya, “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.

Ketiga, firman Allah,” Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara menentukan perkara bersama didasari dengan wahyu. Sebab, Allah mengizinkan hal ini kepada Rasul-Nya. Keempat, tertera dalam tulisan Abu Daud, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang dapat dipercaya. Kelima, kriteria orang yang diajak bermusyawarah dalam masalah kehidupan di masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman, dan santun kepada orang yang mengajak bermusyawarah.

Keenam, Dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka, orang yang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan Sunnah, jika memungkinkan. Apabila Allah telah menunjukkan kepada sesuatu yang dikehendaki maka hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk melaksanakannya sambil bertawakal kepada-Nya, sebab inilah akhir ijtihad yang dikehendaki. Dengan ini pula Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini.

Ketujuh, Allah berfirman, faidza ‘azamta fatawakkal ‘alallah, berarti bahwa kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Qatadah berkata, “ Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya apabila telah membulatkan tekad atas suatu perkara agar melaksanakannya sambil bertawakal kepada Allah SWT.¹¹

Sebagai masyarakat yang harus taat pada peraturan, maka manusia harus patuh kepada atasannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka

¹¹ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 3* (Jakarta: PustakaAzzam, 2007), 622-628.

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹²

Diriwayatkan oleh Bukhari dengan ringkas dan lain-lain, yang bersumber dari 'Ibnu 'Abbas, akan tetapi menurut Imam ad-Dawudi, riwayat tersebut menyalah gunakan nama Ibnu 'Abbas. Dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ketika diutus oleh Nabi SAW, memimpin suatu pasukan.

Di saat 'Abdullah marah-marah kepada pasukannya, ia menyalakan api unggun, lalu memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api. Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa 'Abdullah, mengapa ayat ini dikhususkan untuk menaati 'Abdullah bin Hudzaifah saja, sedangkan pada waktu lainnya tidak, dan sekiranya ayat ini turun sesudahnya, maka berdasarkan hadist yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah didalam hal yang makruf (kebaikan). Jadi tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa mereka tidak taat.

Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, di sini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang maha Tinggi ialah Peraturan Allah. Inilah yang wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul, dan penutup segala rasul ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul membawa undang- undang Tuhan yang termaktub di dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur'an.

Maka isi Kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaatan kepada Allah mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata karena segan kepada manusia, dan bukan pula karena semata-mata mengharap keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia.

Kemudian orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul. Sebab taat kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang wajib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul. Dan dengan taat kepada rasul barulah sempurna beragama. Sebab banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak beragama. Sebab dia tidak percaya kepada Rasul. Kemudian diikuti oleh taat kepada Ulil-Amri-minkum, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas dari pada kamu. Minkum mempunyai dua arti. Pertama di antara kamu, kedua dari pada kamu. Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya, sebagai satu kenyataan.¹³

Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud munasabah ayat ini disangkut pautkan dengan alasan turunnya ayat ini karena dalam kisah tersebut disebutkan adanya batasan antara taat kepada perintah pimpinannya dan menolak perintah untuk terjun ke dalam api, pada saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan.¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 5.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid.2...*, 1276-1277

¹⁴ H. Q. Shaleh, H.A. A Dahlandkk, *Asbabul Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an Edisi ke-2* (Bandung:CV Diponogoro, 2002), 146.

Evaluasi Kebijakan Dalam Mengatasi Problem Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan di lapangan, apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. memberikan pengertian tentang evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. untuk mengetahui sejauh mana atau sampai dimana hasil pendidikan wahyu yang di aplikasikan Rasulullah SAW kepada umatnya dalam surat An Naml ayat 40 :

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

Artinya : berkatalah seorang yang mempunyai ilmu "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".

Setiap perbuatan dan tindakan dalam pendidikan selalu menghendaki hasil, pendidik selalu berharap bahwa hasil yang diperoleh sekarang lebih memuaskan dari yang sebelumnya. Untuk menentukan dan membandingkan antara hasil yang satu dengan yang lainnya diperlukan adanya evaluasi.



Gambar 3. Prosedur Evaluasi Kebijakan

Observasi : pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan melaksanakan prosedur yang sistematis dan tepat. Seleksi : Usaha untuk mencari dan menggali informasi secara jujur, cermat dan obyektif dengan penyeleksian terhadap kepala sekolah yang dianggap sudah siap pada saat dikunjungi. Pembinaan : suatu tindakan untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti dengan diadakannya supervisi terpadu yang dilakukan terus menerus selama 1 bulan sekali Rekomendasi : memberitahukan kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang dapat dipercaya, hal ini pemimpin mengusulkan kepala sekolah yang sudah memenuhi kriteria-kriteria profesional. Tindak Lanjut : mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya, sesuai dengan adanya evaluasi

dengan menindak lanjuti bagi kepala sekolah yang sudah memenuhi standart profesional akan di berikan sertifikat profesional. Dan bagi kepala sekolah yang tidak memenuhi standart akan diberikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan.

Kesimpulan

Analisis kebijakan perspektif islam dalam meningkatkan profesionalisme kepala sekolah dengan mengetahui gejala-gejala yang ada di kepala sekolah. Memulai dengan menggali informasi, pengusulan kebijakan, seleksi kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi sehingga pihak pemimpin bisa membuat alternatif alternatif. Dengan harapan analisis kebijakan yang di buat sesuai problem yang ada di kepala sekolah maupun sekolah jika kebijakan ini baik untuk kepala sekolah. Kebijakan ini akan dilanjutkan, dan jika tidak baik maka pemimpin akan menghentikan atau mengganti kebijakan tersebut.

Model perumusan kebijakan perspektif islam dalam meningkatkan profesionalisme kepala sekolah yaitu dengan melibatkan semua kepala sekolah yang ada di naungan dengan menggunakan model kelompok. dalam merumuskan kebijakan dimulai dari pengumpulan data, deskripsi data, analisis dan evaluasi. Evaluasi analisis kebijakan dalam mengatasi problem dalam meningkatkan profesionalisme kepala sekolah yaitu dengan observasi, seleksi, pembinaan, rekomendasi, tindak lanjut dan melakukan evaluasi dengan cara langsung datang ke sekolah dan melakukan supervisi terpadu.

Daftar Kepustakaan

- Parsons Dye, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- H.Q. Shaleh, H.A.A Dahlan dkk, *Asbabul Nuḏul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an Edisi ke-2*. Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2002.
- Ma'mur, Daud. *Terjemah Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Widjaya, 1993.
- Mulyono. *Educational Leadership*. Malang : UIN Press, 2009.
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta: Balairung & Co, 2003.